

## PENGARUH PAD DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI BALI

Desak Nyoman Utami<sup>1</sup>  
I Gusti Bagus Indrajaya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: [desakutami22@gmail.com](mailto:desakutami22@gmail.com) / Telp. +62 895350631715

### ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita yang ingin diraih setiap daerah termasuk kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Pada masing-masing kabupaten/kota pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi dan belum dapat sejalan dengan perkembangan kesejahteraan masyarakatnya sehingga menyebabkan adanya ketimpangan di masing-masing daerah kabupaten/kota. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dan mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Data yang dipakai adalah data sekunder. Pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan metode observasi non partisipan. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis jalur (*path analysis*). Hasil analisis menunjukkan pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini pertumbuhan ekonomi adalah variabel mediasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi pertumbuhan ekonomi bukan variabel mediasi pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** *pendapatan asli daerah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat*

### ABSTRACT

Community welfare is future goals that want to be achieved, including regency/city in the Bali Province. In each regency/city, the economic growth from 2012 until 2017 has been fluctuated and has not been able to be matched with community welfare development so it is causing inequality in each regency/city. The goals research that will be achieved is to analyze and know the effect of local revenue and capital expenditure on economic growth and community welfare regency/city in the Bali Province. Data used in this research is secondary data. Data collection that related with this research was conducted by using non-participant observation method. Data analysis techniques used to solve the problems in this research is path analysis technique. The result of analysis shows the local revenue and capital expenditure has positive influence to economic growth. Local revenue, capital expenditure and economic growth have positive influence to community welfare. In this research, economic growth is mediating variable the effect of local revenue on community welfare, but economic growth is not mediate variable the effect of capital expenditure on community welfare.

**Keywords:** *local revenue, capital expenditure, economic growth, community welfare*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi adalah suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan riil perkapita dalam jangka panjang dan diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan (Yasa dan Arka, 2015). Tujuan akhir dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk (Rimbawan, 2012). Banyak upaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan di daerahnya yang diharapkan dapat memberi pengaruh positif untuk kesejahteraan masyarakatnya. Adanya pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk dari desentralisasi merupakan upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah untuk meraih tujuannya (Wijayanti dan Darsana, 2015).

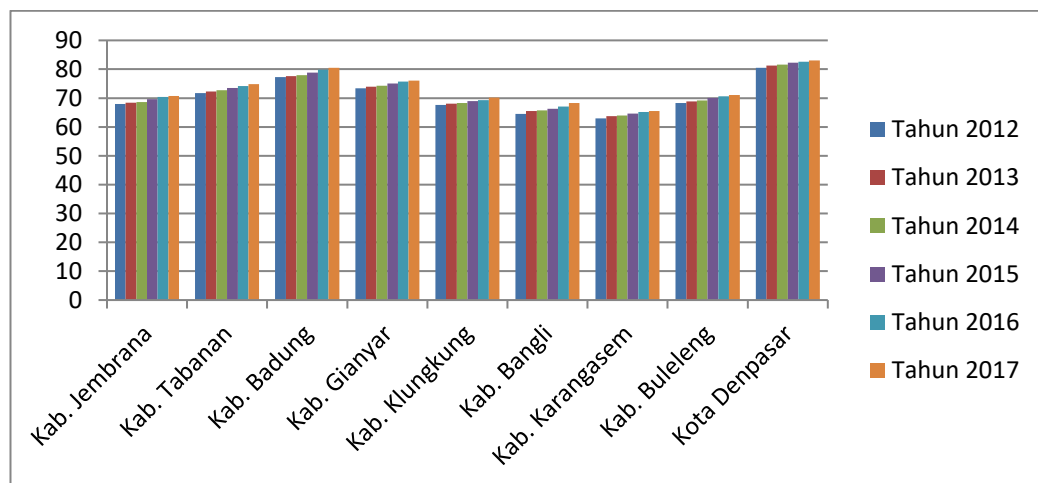
Upaya-upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan pembangunan sosial ekonomi yang dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri (Akudugu, 2012). Menurut Pratowo (2012) keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan parameter yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)*. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal *Human Development Indeks (HDI)* merupakan suatu konsep dari program UNDP untuk menanggulangi kemiskinan dengan prioritas yaitu 3 standar indeks yang tersusun secara sistematis yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli (Hariwan dan Swaningrum, 2015).

Aspek pembangunan manusia menjadi salah satu indikator dalam menentukan kemajuan dari suatu daerah (Dianaputra dan Aswitari, 2017). Mirza (2011) menyatakan bahwa IPM merupakan salah satu tolak ukur dalam melihat

kualitas hidup manusia yang diukur melalui kualitas kesehatan, tingkat pendidikan dan ekonomi (daya beli). Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat tergantung pada komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang (Rustariyuni, 2014).

Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita yang ingin diraih setiap daerah termasuk kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat Bali bisa diamati dari angka angka IPM yang diperoleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berikut merupakan IPM masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali.

**Gambar 1** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017(persen)



Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2018*

Gambar 1 menunjukkan IPM pada kabupaten/kota tahun 2012-2017 terus meningkat. Peringkat tertinggi diraih oleh Kota Denpasar diikuti oleh Kabupaten Badung dan Gianyar berturut-turut pada posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, Kabupaten Karangasem meraih peringkat terendah dalam capaian mutu modal

manusia pada periode tersebut. Tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah yang berbeda ini dapat menyebabkan adanya ketimpangan antarwilayah (Ali dkk, 2013). Hingga saat ini, ketimpangan antardaerah telah menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan kepentingan pemerintah maupun masyarakat (Irawan, 2015).

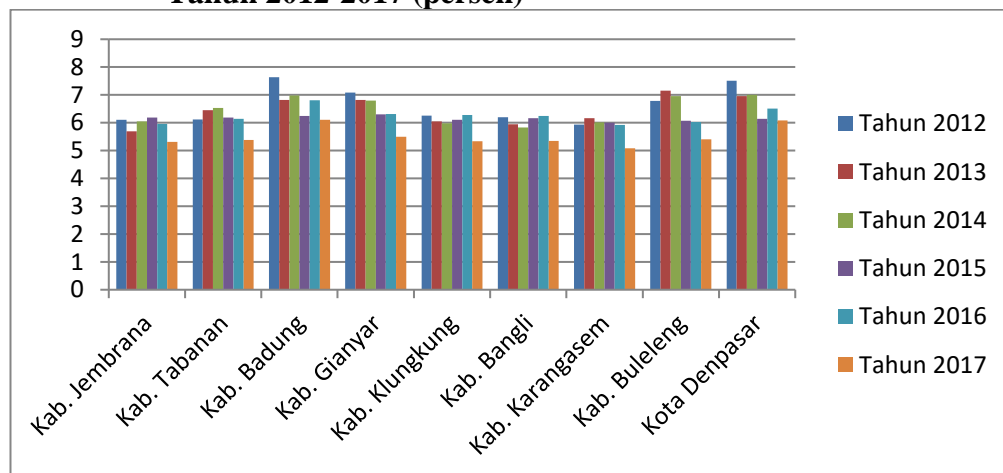
Indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah salah satunya adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Adipuryanti dan Sudibia, 2015). Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan persediaan sumberdaya yang dapat mendorong pembangunan manusia menjadi lebih baik (Lumbantoruan dan Hidayat, 2014). Pertumbuhan ekonomi adalah unsur penting dalam mengentaskan kemiskinan dan menghasilkan sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan manusia (Fatah dkk., 2012).

Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan dengan memanfaatkan semua sumberdaya secara optimal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Fajrii dkk, 2016). Cooray (2009) menyatakan bahwa jika pemerintah daerah mempunyai tata pemerintahan yang baik maka akan mudah mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh potensi daerah saja tetapi pengetahuan dan teknologi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena dapat menciptakan inovasi yang dapat berguna untuk mengembangkan potensi daerah (Kaur, 2016).

Berdasarkan Gambar 2 pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada kabupaten/kota mengalami fluktuasi dari tahun 2012-2017. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota Provinsi Bali disebabkan karena belum seimbangya pembangunan antarkabupaten sebagai dampak dari tidak

meratanya infrastruktur, kurangnya kelengkapan infrastruktur dalam bidang kesehatan, pendidikan, jalan raya, air bersih dan transportasi dalam menunjang aktivitas ekonomi masih dirasa kurang memadai sampai ke daerah-daerah terpencil (Awandari dan Indrajaya, 2016).

**Gambar 2** Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017 (persen)



Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2018*

Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dan IPM yang terjadi pada masing-masing kabupaten/kota belum menunjukkan hubungan yang positif dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi belum sejalan dengan perkembangan tingkat IPM yang sangat baik. Hal ini terjadi karena pada dasarnya setiap wilayah memiliki kemampuan yang berbeda untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerahnya, sehingga jika semakin tingginya penerimaan daerah maka daerah tersebut akan semakin mudah dalam mendorong pertumbuhannya dan dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang baik.

Salah satu target utama indikator pencapaian ekonomi makro suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat (Maqin dan Iwan, 2017).

Zhouhaier (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat berjalan dengan baik jika pemerintah daerah diberikan otonomi daerah. Salah satu pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya desentralisasi fiskal, yaitu sumber-sumber penerimaan bagi daerah dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing masing (Santosa, 2013).

Terwujudnya desentralisasi fiskal dapat memicu pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah (Ikeji, 2011). Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa melalui desentralisasi fiskal pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa mengalami perubahan yang lebih baik. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Malik, dkk(2006) bahwa desentralisasi fiskal merupakan strategi yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pose (2007) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat memberi perubahan yang signifikan terhadap pemerataan dan kesejahteraan.

Menurut Ismanudin (2011) suatu daerah otonom harus mempunyai kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah bisa menopang proses pertumbuhan dan pada akhirnya pemerintah memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi (Dalamagas, 2010). Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah.

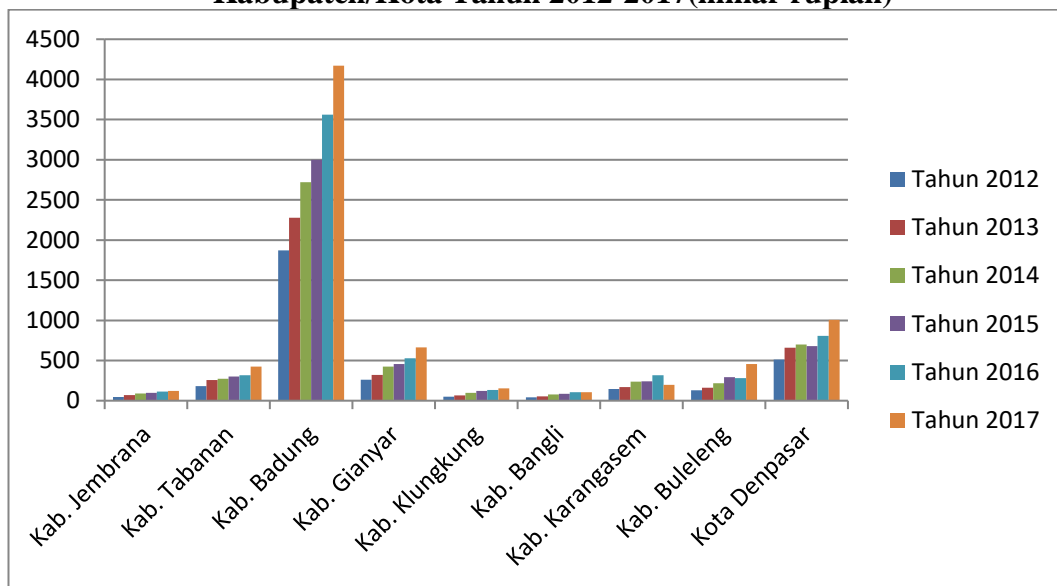
Meningkatnya pendapatan daerah dapat memungkinkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM jika dana tersebut dialokasikan tepat sasaran. Setyowati dan Suparwati (2012) menyatakan pemerintah daerah seharusnya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting dan bermanfaat yang berkaitan dengan program kepentingan publik seperti melakukan aktivitas pembangunan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terciptanya berbagai program kepentingan publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang akhirnya dapat mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengindikasikan daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam permasalahan keuangan. PAD bisa dijadikan sebagai tolak ukur besarnya kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan daerah itu sendiri. Penerimaan daerah yang berasal dari PAD diharapkan bisa meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah selain untuk membiayai belanja rutin, sehingga terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang semakin baik tentunya akan berpengaruh pada semakin sejahteranya masyarakat dan IPM juga akan meningkat (Putra dan Ulupui, 2015).

Gambar 3 menunjukkan data realisasi PAD periode 2012-2017 pada kabupaten/kota Provinsi Bali. PAD yang diterima oleh masing-masing

kabupaten/kota selama kurun waktu enam tahun mengalami fluktuasi. Peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Badung, kemudian diikuti oleh Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar berturut-turut pada posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, Kabupaten Bangli meraih peringkat terendah dalam menerima PAD.

**Gambar 3** Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017 (miliar rupiah)



Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, berbagai edisi*

Pengalokasian dana dalam bentuk belanja modal oleh pemerintah diharapkan bisamengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Menurut Halim (2002:72) belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang akan menambah aset atau kekayaan daerah, belanja modal adalah salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu kesejahteraan masyarakat meningkat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan fasilitas penunjang pelayanan publik. Peningkatan alokasi belanja modal dalam wujud aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting untuk



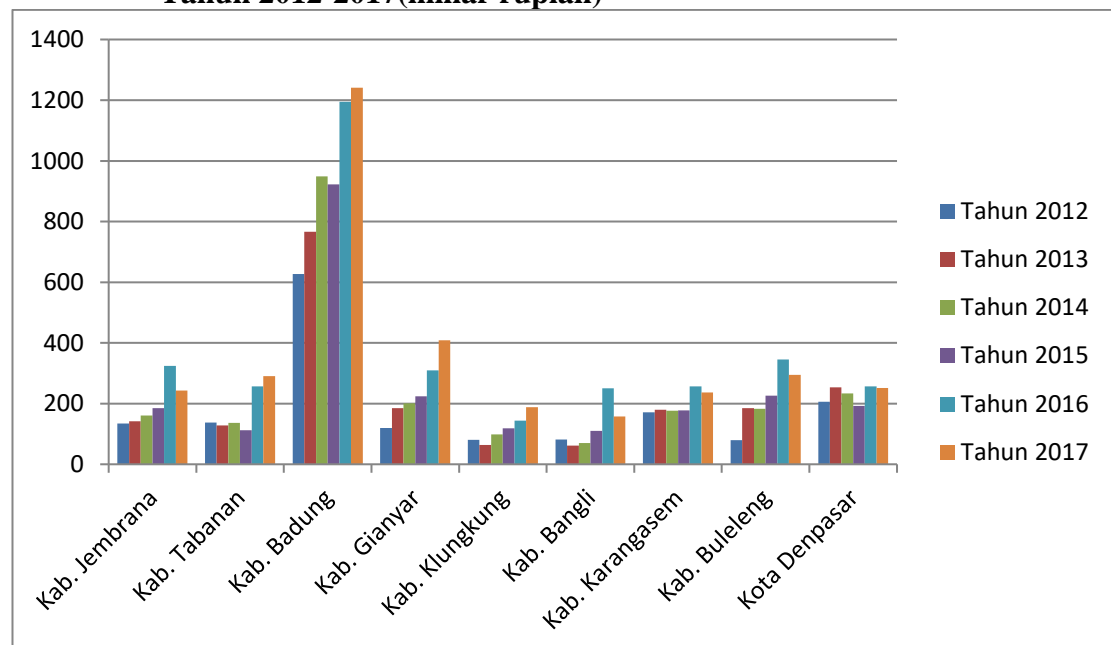
menunjang produktivitas perekonomian karena jika belanja modal tinggi maka produktivitas perekonomian semakin meningkat (Novita, 2012).

PAD yang merupakan penerimaan daerah diharapkan bisa menaikkan investasi belanja modal pemerintah daerah selain untuk membiayai belanja rutin, sehingga kualitas pelayanan publik dapat maksimal (Putra dan Ulupui, 2015). Belanja modal digunakan untuk pembuatan aset tetap publik yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya, yang ditujukan untuk layanan publik dan petugas. Dalam hal ini, belanja modal yang digunakan untuk layanan publik akan lebih produktif daripada belanja modal yang digunakan untuk aparatur daerah (Triyanto dkk, 2017).

Tugas pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu mengeluarkan belanja pemerintah dengan efektif untuk menopang aktivitas perekonomian seperti pembangunan sarana prasarana publik, selain itu dengan tepatnya mengalokasikan belanja pemerintah maka diharapkan pendapatan daerah juga dapat mengalami peningkatan (Kusuma, 2016). Belanja modal hendaknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melaksanakan aktivitas pembangunan (Yovita, 2011). Modebe, dkk (2012) juga berpendapat bahwa adanya infrastruktur berkualitas maka produktivitas juga akan meningkat. Belanja modal yang meningkat diharapkan bisa memperbaiki kualitas pelayanan publik agar lebih baik karena aset tetap daerah yang meningkat merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat adalah hasil dari pengeluaran belanja modal.

Gambar 4 menunjukkan data realisasi belanja modal 2012-2017 pada kabupaten/kota Provinsi Bali. Belanja modal yang dikeluarkan oleh masing-masing kabupaten/kota selama kurun waktu enam tahun mengalami fluktuasi. Kabupaten Badung meraih peringkat tertinggi dalam mengeluarkan belanja modal, sedangkan peringkat terendah yaitu Kabupaten Bangli. Pengalokasian belanja modal ini dianggarkan sesuai dengan kebutuhan di daerah.

**Gambar 4** Realisasi Belanja Modal Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2017 (miliar rupiah)



Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, berbagai edisi*

Meningkatnya PAD dan belanja modal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pengalokasian dana tersebut tepat dan berjalan sesuai dengan sasaran pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali. Adanya pengelolaan dana di daerah masing-masing maka sangat diperlukan penggunaan dana tersebut secara optimal sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara

merata. Pada latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 2) Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 3) Untuk menganalisis dan mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Lokasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali dengan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). . Obyek pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2012-2017.

Variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi: 1) Variabel terikat (*dependent variabel*) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya atau oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat( $Y_2$ ). 2) Variabel bebas (*independent variabel*) yaitu variabel yang tidak dipengaruhi variabel lainnya atau variabel yang

mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) dan belanja modal ( $X_2$ ). 3) Variabel mediasi/intervening yaitu variabel yang secara teoritis memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen melalui hubungan yang tidak langsung (Utama, 2016:160). Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi( $Y_1$ ).

Pada penelitian ini teknik analisis yang dipakai adalah teknik analisis jalur (*path analysis*) dengan menggunakan SPSS. *Path Analysis* adalah teknik analisis yang dipakai untuk menguji pengaruh tidak langsung dan pengaruh langsung variabel-variabel pada penelitian ini. *Path Analysis* digunakan dalam suatu penelitian apabila hubungan yang dianalisis merupakan hubungan sebab akibat dengan model yang kompleks (Utama, 2016:159).

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = bX_1 + b_2X_2 + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

$$Y_2 = b_3X_1 + b_4X_2 + bY_1 + e_2 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- $Y_1$  = pertumbuhan ekonomi
- $Y_2$  = kesejahteraan masyarakat
- $X_1$  = pendapatan asli daerah
- $X_2$  = belanja modal
- $e_1, e_2$  = variabel pengganggu
- $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5$  = koefisien regresi
- $r_{x_1x_2}$  = korelasi antara pendapatan asli daerah dan belanja modal

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Struktur pertama yang diuji adalah pengaruh PAD dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh PAD dan belanja modal pada pertumbuhan ekonomi, pengujian dilakukan dengan SPSS dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1 Hasil Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.513	.157		3.272	.002
	X1	.074	.017	.601	4.443	.000
	X2	.061	.028	.297	2.197	.033

a. Dependent Variable: Y1

Berdasarkan hasil yang terdapat pada Tabel 1 maka dapat disusun model persamaan regresi berikut ini:

$$Y_1 = 0,601X_1 + 0,297X_2 + e_1$$

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa PAD memiliki *standardized coefficient beta* sebesar 0,601 dan sig. 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tabel 1 juga menunjukkan bahwa belanja modal memiliki *standardized coefficient beta* sebesar

0,297 dan sig. 0,033 <0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Struktur kedua yang diuji yaitu pengaruh PAD, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan. Pengujian dilakukan untuk melihat pengaruh PAD, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, pengujian dilakukan dengan SPSS ada pada Tabel 2.

**Tabel 2 Hasil Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.383	.077		-18.004	.000
	X1	.308	.009	.713	35.098	.000
	X2	.199	.013	.276	15.304	.000
	Y1	.149	.062	.043	2.391	.021

a. Dependent Variable: Y2

Berdasarkan hasil yang terdapat pada Tabel 1 maka dapat disusun model persamaan regresi berikut ini:

$$Y_2 = 0,713X_1 + 0,276X_2 + 0,043Y_1 + e_2$$

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa PAD memiliki *coefficient beta* sebesar 0,713 dan sig. 0,000<0,05. Ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa belanja modal memiliki *standardized coefficient beta* yaitu 0,276 dan sig.

0,000<0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tabel 2 juga dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki *standardized coefficient beta* yaitu 0,043 dan sig. 0,021<0,05 yang berarti pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### **Nilai kekeliruan taksiran standar (*standar error of estimate*)**

Nilai  $e_1$  berarti jumlah varian variabel pertumbuhan ekonomi yang tidak dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} e_1 &= \sqrt{1 - R^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,758} = 0,491 \end{aligned}$$

Nilai  $e_2$  berarti jumlah varian variabel kesejahteraan masyarakat yang tidak dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} e_2 &= \sqrt{1 - R^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,996} = 0,063 \end{aligned}$$

#### **Pemeriksaan Validitas Model**

Ada indikator untuk melakukan pemeriksaan dalam memeriksa validitas model adalah koefisien determinasi total hasilnya yakni:

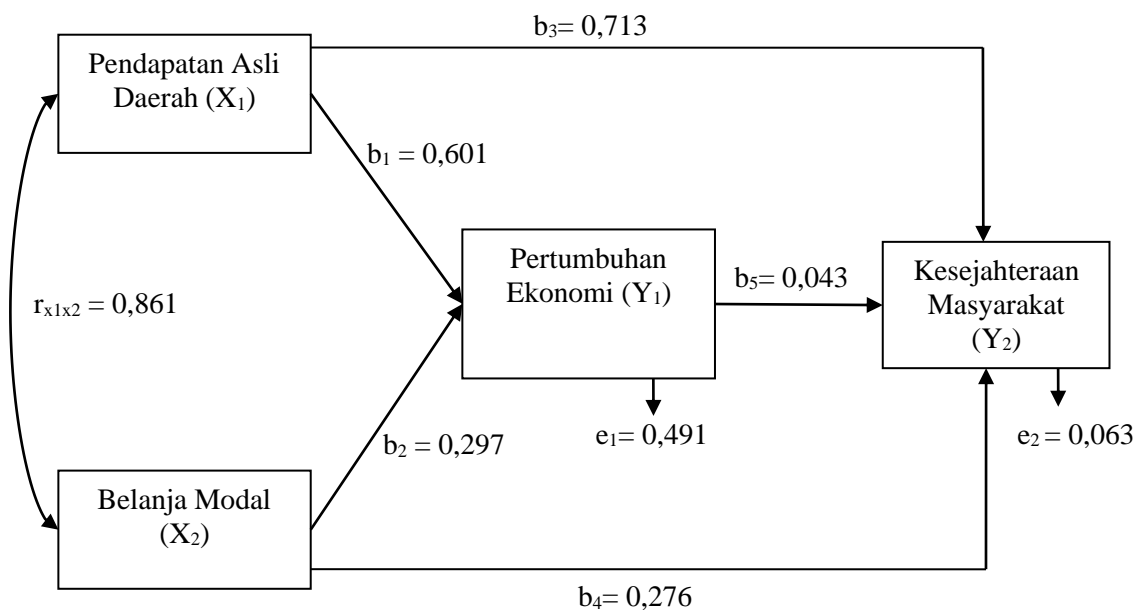
$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - (Pe_1)^2 - (Pe_2)^2 \\ &= 1 - (0,491)^2 - (0,063)^2 \\ &= 0,968 \end{aligned}$$

Keterangan:

$R^2_m$  = Koefisien determinasi total

$e_1, e_2$  = Nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total dapat diketahui bahwa keragaman data yang bisa dijelaskan oleh model yaitu 0,968 artinya sebesar 96,8% variabel pendapatan asli daerah, variabel belanja modal, variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel kesejahteraan masyarakat bisa dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 3,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Berikut merupakan gambar diagram hasil analisis jalur hasil penelitian ini.



**Gambar 4.1 Diagram Hasil Analisis Jalur**



### Uji Sobel

- 1) Uji variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{\beta_1 S_{\beta_1}^2 + \beta_5^2 S_{\beta_5}^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{(0,149)^2 (0,017)^2 + (0,074)^2 (0,062)^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = 0,0052$$

Keterangan :

$S_{\beta_1}$  = Standar error koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

$S_{\beta_5}$  = Standar error koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat

$$Z = \frac{\beta_1 \beta_5}{S_{\beta_1 \beta_5}}$$

$$Z = \frac{(0,074)(0,149)}{0,0052}$$

$$Z = 2,120$$

Nilai z hitung sebesar 2,120 lebih besar dari 1,96, ini berarti pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi pengaruh PAD terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi pengaruh PAD terhadap kesejahteraan masyarakat, berarti

pendapatan asli daerah yang diperoleh masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi tentunya akan memberikan kesempatan lebih besar masyarakat untuk meningkatkan pengeluarannya pada bidang kesehatan dan pendidikan sehingga dapat memberikan dampak yang baik pula terhadap kesejahteraannya dalam jangka panjang (Rosita dan Sutrisna, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Darsana (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memberikan dampak secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi.

- 2) Uji variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_2}^2 + \beta_2^2 S_{\beta_5}^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{(0,149)^2(0,028)^2 + (0,061)^2(0,062)^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = 0,0056$$

Keterangan :

$S_{\beta_2}$  = Standar error koefisien regresi variabel belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi

$S_{\beta_5}$  = Standar error koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat

$$Z = \frac{\beta_2\beta_5}{S_{\beta_2\beta_5}}$$

$$Z = \frac{(0,061)(0,149)}{0,0056}$$

$$Z = 1,623$$

Nilai z hitung sebesar 1,623 lebih kecil dari 1,96, ini berarti pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel mediasi pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi bukan sebagai variabel mediasi pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan dilihat pada perkembangan belanja modal yang dikeluarkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2012-2017 cenderung berfluktuasi sehingga belum mampu memicu pertumbuhan ekonomi yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal pada postur APBD Bali ini rendah disebabkan oleh tingginya proporsi belanja tidak langsung yang masih mendominasi dalam penganggaran (NusaBali.com, 2017).

### **Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Berdasarkan hasil olah data ditemukan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penelitian ini sesuai dengan teori keynesian yang menyatakan kenaikan pengeluaran/belanja pemerintah akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan, maka akan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2007:277). Jika teori keynesian ini dimasukkan unsur daerah, maka dapat dimaknai bahwa pada saat pendapatan suatu daerah meningkat yaitu PAD,

secara otomatis pengeluaran mengalami kenaikan sehingga dengan meningkatnya pengeluaran maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Mawarni, dkk (2013) yang menghasilkan PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Hal ini sesuai dengan yang didapat Setyawati dan Hamzah (2007) yang menghasilkan PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika suatu daerah menerima PAD semakin tinggi, maka semakin berkurang daerah tersebut memiliki tingkat ketergantungan fiskal kepada pusat dan daerah tersebut lebih fleksibel dan lebih leluasa dalam menyusun dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhannya.

### **Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali yang berarti belanja modal yang meningkat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal dapat bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan memiliki sifat produktif sehingga dapat menstimulus perekonomian di daerah bersangkutan.

Menurut Adam Smith pertumbuhan ekonomi suatu negara dibentuk dari tiga unsur yaitu sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia dan

akumulasi modal yang dimiliki (Arsyad, 2010:75). Menurut Harrod-Domar faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu pembentukan modal, pembentukan modal dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan (Arsyad, 2010:84). Belanja modal adalah salah satu bentuk dari pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yaitu hubungan keduanya bisa diamati dari meningkatkan pelayanan publik yang merupakan tujuan utama dari otonomi daerah.

Menurut Rostow dan Musgrave (Mangkoesoebroto, 1993:169) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan menjadi 3 tahap yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pemerintah daerah membangun sarana dan prasarana yang nantinya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dipicu dengan semakin banyaknya infrastruktur dan perbaikannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Nugroho, 2010).

Hasil pada penelitian ini, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alexiou (2009) dan Putra (2016) yaitu belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berarti bahwa jika belanja modal naik maka bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Modal dasar melakukan aktivitas ekonomi yaitu sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi, maka dari itu untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang optimal yaitu dengan pengalokasian anggaran belanja yang tepat sasaran.

## **Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Berdasarkan hasil olah data ditemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sari dan Supadmi (2016), serta Putra dan Ulupui (2015) yang menyatakan bahwa meningkatnya PAD memungkinkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM jika dana tersebut dialokasikan tepat sasaran. PAD mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dimana komponen kesejahteraan dalam penelitian ini diukur dengan IPM adapun komponennya yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*).

PAD yang merupakan pendapatan daerah yang menjadi dana pemerintah untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan belanja daerah untuk meraih kesejahteraan. Pengalokasian PAD seharusnya digunakan untuk belanja modal seperti pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan potensi wilayah sehingga komponen dalam IPM dapat ditingkatkan. Berdasarkan hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat bisa disebabkan oleh PAD yang tinggi, sehingga PAD berpengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat.

### **Pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali**

Berdasarkan hasil olah data ditemukan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini sesuai dengan hasil yang diperoleh Setyowati dan Suparwati (2012), dan Mirza (2011) menemukan pengaruh positif dan signifikan belanja modal terhadap peningkatan IPM. Penelitian Kusreni dan Suhab (2009) menghasilkan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan pada kesejahteraan masyarakat, ini berarti bahwa jika angka IPM yang tinggi sebagai wujud dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat dipicu dengan belanja modal yang meningkat.

### **Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Berdasarkan hasil olah data diperoleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini sesuai dengan teori pembangunan ekonomi Rostow yang membagi proses pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap pembangunan yakni masyarakat tradisional, tahap prasyarat untuk lepas landas, tahap lepas landas, tahap menuju kedewasaan, dan tahap masa konsumsi tinggi (Arsyad, 2010;62). Rostow menyatakan prasyarat agar bisa tinggal landas, suatu negara harus dapat membangun pertanian, industri dan perdagangannya sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, jika pertumbuhan ekonomi tinggi maka perhatian masyarakat

bukan lagi pada masalah produksi melainkan dapat lebih fokus pada permasalahan yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Setyowati dan Suparwati (2012), Wijayanti dan Darsana (2015) serta Rosita dan Sutrisna (2018) bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dan signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada penelitian ini berarti bahwa adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui angka IPM yang mengalami peningkatan.

**Tabel 3 Hasil Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total Variabel PAD, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2012-2017**

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung Melalui $Y_1$	
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,601		0,601
$X_1 \rightarrow Y_2$	0,713	0,025	0,738
$X_2 \rightarrow Y_1$	0,297		0,297
$X_2 \rightarrow Y_2$	0,276	0,013	0,289
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,043		0,043

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa pengaruh tidak langsung PAD ( $X_1$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) melalui pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) adalah sebesar 0,025, ini berarti bahwa PAD berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi



adalah sebesar 2,5%. Pengaruh tidak langsung belanja modal ( $X_2$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) melalui pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) sebesar 0,013, ini berarti bahwa belanja modal berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 1,3%.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan asli daerah dan belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2017.
- 2) Pendapatan asli daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2017.
- 3) Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2017.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan adalah sebagai berikut

- 1) Belanja modal merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output* berupa aset tetap, sebagian besar

belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik. Pemerintah daerah diharapkan agar bisa mengoptimalkan pengalokasian belanja modal untuk kepentingan belanja pembangunan dan pengalokasian belanja modal tersebut harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

- 2) Dalam upaya peningkatan IPM masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali, perlu kebijakan mengenai pendorong pertumbuhan ekonomi supaya lebih terfokus pada program sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Program sasaran yang dimaksud adalah di bidang kesehatan, pendidikan dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai bekal mencapai kehidupan yang layak. Dalam upaya peningkatan IPM masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali, perlu mendapat prioritas perhatian untuk kabupaten/kota dengan IPM yang rendah yaitu Kabupaten Karangasem.

## REFERENSI

Adipuryanti, Ni Luh Putu Yuni dan I Ketut Sudibia. 2015. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Investasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *PIRAMIDA*, 11 (1), 20-28.

Akudugu, Jonas Ayaribilla. (2012). Accountability in local government revenue management: who does what?. *Information and Knowledge Management*, 2 (8), 22-33.

Alexiou, Constantinos. (2009). Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE). *Journal of Economic and Social Research*, 11 (1), 1-16.

Ali, Hasnah, A. C. Er, A. R. Ahmad, N. Lyndon dan Sanep Ahmad. (2013). An Analysis of the Impact of Foreign Investment on Regional Disparities: A Case of Malaysia. *Asian Social Science*, 9 (14), 7-17.

Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.

Awandari, Luh Putu Putri dan I Gusti Bagus Indrajaya. (2016). Pengaruh Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Kesempatan Kerja. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5 (12), 1435-1462.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2013). *Provinsi Bali Dalam Angka 2013*.

\_\_\_\_\_. (2014). *Provinsi Bali Dalam Angka 2014*.

\_\_\_\_\_. (2015). *Provinsi Bali Dalam Angka 2015*.

\_\_\_\_\_. (2016). *Provinsi Bali Dalam Angka 2016*.

\_\_\_\_\_. (2017). *Provinsi Bali Dalam Angka 2017*.

\_\_\_\_\_. (2018). *Provinsi Bali Dalam Angka 2018*.

\_\_\_\_\_. (2018). *Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. Diunduh dari website: <https://bali.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/103> Diakses pada tanggal 8 September 2018

\_\_\_\_\_. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. Diunduh dari website: <https://bali.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/137> Diakses pada tanggal 8 September 2018

Cooray, Arusha. (2009). Government Expenditure, Governance and Economic Growth. *Comparative Economic Studies*, 51 (3), 401-418.

Dalamagas, Basil. (2010). Public Sector and Economic Growth: the Greek Experience. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 32 (3), 277-288.

Dianaputra, I Gede Komang Angga dan Luh Putu Aswitari. (2017). Pengaruh Pembiayaan Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Kualitas Manusia serta Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten /Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2015. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6 (3), 186-311.

Fajrii, Muhammad, Arman Delis dan Yohanes Vyn Amzar. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Keterbukaan Daerah terhadap

Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9 (2), hal. 99-107.

Fatah, Fazleen., Nasuddin, O., dan Shamisah, A.(2012). Economic Growth, Political Freedom and Human Development: China, Indonesia and Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*, 3 (1), 291-299.

Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Hariwan, Peggy dan Ayu Swaningrum. 2015. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8 (1), 72-82.

Ikeji. Chibueze C. (2011). Politics of Revenue Allocation in Nigeria: A Reconsideration of Some Contending Issues. *Politics of Revenue of Policy and Strategic Studies*, 1 (1), 121-136.

Irawan, Andi. (2015). Regional Income Disparities in Indonesia: Measurements, Convergence Process, and Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51 (1), 148-149.

Ismanudin. (2011). Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Kemandirian Daerah Kabupaten Indramayu. *Jurnal Aspirasi*, 1 (2), 1-7.

Kaur, Masjinder. 2016. Knowledge in the Economic Growth of Developing Economies. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol 8 No. 2, 205-212.

Kusreni, Sri dan Sultan Suhab. (2009). Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 5 (3), 1-18.

Kusuma, Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9 (1), 1-11.

Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. (2000). Fiscal Decentralization and economic growth in China. *Economic Development and Cultural Change*, 49, hal.1-21.

Lumbantoruan, Eka Pratiwi dan Hidayat, Paidi. (2014). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi di Indonesia (Metode Kointegrasi). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2 (2), 14-27.

- Malik, Shahnawaz, Mahmood-ul-hassan and Shahzad Hussain. (2006). Fiscal Decentralization and Economic Growth in Pakistan. *Departement of Economics, Bahauddin Zakariya Universit, Multan Pakistan*, 45 (4), 845-854.
- Mangkoesoebroto, Guritno. (1993). *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory. (2007). *Makroekonomi*, Edisi Keenam. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Maqin, R. Abdul dan Iwan Sidharta. (2017). The Relationship of Economic Growth with Human Development and Electricity Consumption in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 7 (3), 201-207.
- Mawarni, Darwanis, dan Syukriy Abdullah. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Aceh). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2(2), 80-90.
- Mirza, Denni Sulistio. (2011). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap IPM Jawa Tengah. *Jejak*, 4 (2), 102-113.
- Modebe, N.J., Regina G. Okafor, J.U.J Onwumere and Imo G. Ibe. (2012). Impact of Recurrent and Capital Expenditure on Nigeria's Economic Growth. *European Journal of Business and Management*, 4 (19), 66-74.
- Novita. (2012). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Keserasian Belanja Daerah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Skripsi*. Sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Udayana. Denpasar.
- Nugroho, Suratno Putro. (2010). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- NusaBali.com. 2017. Tingginya Belanja Tak Langsung Jadi Sorotan. <https://www.nusabali.com/index.php/berita/17593/tingginya-belanja-tak-langsung-jadi-sorotan>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2019.
- Pose, Rodriguez. (2007). Fiscal Decentralization, Efficiency and Growth. *Journal of Departement Of Geography and Environmental, London School of Economics London*, 11,1-40.

- Pratowo, Nur Isa. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*, 1 (1), 15-31.
- Putra, Ardiansyah. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, 3 (1), 12-25.
- Putra, Putu Gde Mahendra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11 (3), 863-877.
- Rimbawan, Nyoman Dayuh . 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja (Kasus Provinsi Bali, 2001-2011). *PIRAMIDA*, 3 (2), 76-84.
- Rosita, Ida Ayu Putu Mega dan I Ketut Sutrisna. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7 (7), 1445-1471.
- Rustariyuni, Surya Dewi. 2014. Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2004-2012. *PIRAMIDA*, 10 (1), 45-55.
- Santosa, Budi. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 5 (2), 130-143.
- Sari, Ida Ayu Candra Yunita dan Ni Luh Supadmi. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15 (3), 2409-2438.
- Setyawati, Anis dan Ardi Hamzah. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4 (2), 211-228.
- Setyawati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). *Jurnal Prestasi*, 9 (1), 113-133.

Triyanto, Danang, Setyo Tri Wahyudi dan Candra Fajri Ananda. 2017. *The Effect of Capital Expenditure on Local Own-Source Revenue: Study In East Java Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10 (2), 137-144.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Utama, Made Suyana. (2016). *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Denpasar

Wijayanti, Ni Kadek Herni dan Ida Bagus Darsana. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4 (9), 1165-1193.

Yasa, I Komang Artana Yasa dan Sudarsana Arka. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8 (1), 63-71.

Yovita, Farah Marta. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). *Skripsi*. Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Zouhaier, Hadhek. 2012. Institutions, Investment and Economic Growth. *International Journal of Economics and Finance*, 4 (2), 152-162.